

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Analisis Masalah.....	5
I.2.1 Identifikasi Masalah	5
I.2.2 Pembatasan Masalah	5
I.2.3 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Konsep Undang-Undang.....	9
2.1.2 Konsep Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda.....	10
2.1.3 Konsep Pergerakan Bangsa Indonesia 1918-1946.....	12
2.2 Kerangka Pikir	13
2.3 Paradigma	15
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Yang Digunakan	16
3.1.1 Heuristik.....	18
3.1.2 Kritik Sumber	18
3.1.3 Interpretasi	19
3.1.4 Historiografi.....	19
3.2 Variabel Penelitian.....	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.3.1 Teknik Kepustakaan	21
3.3.2 Teknik Dokumentasi.....	21
3.4 Teknik Analisis Data	22
3.4.1 Reduksi Data.....	23
3.4.2 Sajian Data.....	23
3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	24

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Hasil

4.1.1 Sejarah Singkat Hukum Pidana di Indonesia.....	25
4.1.1.1 Masa <i>Besluiten Regering</i> (1814-1855).....	30
4.1.1.2 Masa <i>Regering Reglement</i> (1855-1926)...	31
4.1.1.3 Masa <i>Indische Staatregeling</i> (1926-1942)	32
4.1.1.4 Zaman Pendudukan Jepang.....	33
4.1.1.5 Macam-Macam Pelanggaran dan Kejahatan.....	35
4.1.1.6 Tujuan Hukum Pidana.....	38
4.1.1.7 Peristiwa Pidana	39
4.1.2 Timbulnya Pergerakan Bangsa Indonesia.....	40
4.1.3 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Organisasi Politik Pada Masa Pergerakan Bangsa Indonesia 1918-1946	46
4.1.3.1 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Perhimpunan Indonesia.....	46
4.1.3.2 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Partai Komunis Indonesia	49
4.1.3.3 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Partai Nasional Indonesia	52
4.1.3.4 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Partai Indonesia Raya	56
4.1.3.5 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Gerakan Rakyat Indonesia	59
4.1.3.6 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda Terhadap Gabungan Politik Indonesia.....	61

4.2 Pembahasan

Penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesi 1918-1946.....	64
--	----

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA